



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang : 2005-2006
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 6 Juni 2006
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR-RI
Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh KASAL
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir : 44 orang Anggota dari 49 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Slamet Soebijanto beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Slamet Soebijanto pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2006 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI menghargai prakarsa KASAL dalam menyusun rencana pembangunan TNI AL 2005-2024, tetapi Komisi I DPR RI mengingatkan bahwa pembangunan postur dan pembangunan TNI AL secara keseluruhan harus didasarkan pada *Strategic Defence Review* (SDR) dan diintegrasikan dengan Mabas TNI dan matra-matra lain sesuai dengan doktrin sistem pertahanan terpadu.
2. Komisi I DPR RI mendukung dan minta agar KASAL secepatnya menyelesaikan kepastian hukum aset-aset yang bermasalah terutama yang berupa tanah dan rumah dinas termasuk di dalamnya penyelesaian rumah dinas yang dihuni oleh purnawirawan TNI AL dengan mengedepankan pendekatan dialog, manusiawi dan semangat gotong royong dan memperhatikan kebutuhan tempat penghunian bagi para penghuni tersebut. Dalam upaya mempercepat penyelesaian beberapa kasus yang berlarut seperti perumahan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir - DBAL Surabaya dan Kalibanteng - Semarang, Komisi I DPR RI akan mengadakan pertemuan dengan Mabas AL

dengan mendengarkan purnawirawan penghuni, agar tercapai solusi yang komprehensif dan meminimalisir potensi konflik.

3. Minimnya budget TNI AL yang dapat disediakan negara, mengharuskan TNI AL menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan TNI AL. Oleh karena itu Komisi I DPR RI minta agar KASAL mempertajam skala prioritas program dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan prajurit, dan peningkatan kemampuan TNI AL melalui peningkatan profesionalisme, dan pengadaan alutsista dengan pendekatan *repairing* dan *repowering*, disamping pengadaan alutsista yang baru.
4. Keberadaan kapal-kapal AL di wilayah perbatasan belum optimal di dalam menjaga dan mengamankan wilayah perairan RI. Oleh karena itu Komisi I DPR RI minta KASAL agar terus meningkatkan kapasitas keamanan di perbatasan perairan RI melalui kapal-kapal yang dimiliki AL.
5. Mengingat kebutuhan minimum *essential requirement* alutsista TNI AL serta keterbatasan anggaran, maka dalam perencanaan pengadaan alutsista supaya tidak terfokus pada satu negara, tetapi perlu membuka negara-negara sumber lainnya dengan prinsip memperoleh *supply* alutsista berdasarkan kebutuhan TNI AL serta dengan kualitas yang memadai dan harga yang bersaing, *delivery* yang tepat, dukungan pendanaan yang kredibel dan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengadakan koordinasi antar Departemen dalam rangka mempercepat proses pengadilan yang cepat dan menjatuhkan hukuman yang adil dan sesuai dengan ketentuan terhadap pelaku *illegal logging*, *illegal fishing* dan lain-lain serta penegakan hukum yang membuat efek jera agar dapat meminimalisir pencurian Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA